

*"Membunuh itu dilarang; semua pelakunya harus dihukum kecuali mereka melakukan pembunuhan dalam jumlah besar dan seirama dengan bunyi terompet."*

—Voltaire

NOMOR 08 - SEPTEMBER 2007

# JURNAL APOKALIPS

NEWSLETTER PERIODIKAL 2 BULANAN | GRATIS SEPERTI TEROR



# EDITORIAL

Di bulan ini kita seakan diingatkan tentang apa yang terjadi pada 11 September enam tahun silam. Kita seakan diingatkan tentang betapa aksi tersebut menjadi begitu tak berperikemanusiaan, tetapi kita juga sekaligus dihadapkan pada kenyataan bahwa di Indonesia walaupun penuh menerima kecaman, aksi-aksi teror seakan terus bergaung dan terus menuai penduduknya sendiri. Kita seakan terhipnotis dalam diam. Seakan tak peduli kita terus melanjutkan hidup tak bernyawa kita. Kita terus bekerja untuk membeli dengan upah kita barang-barang yang mampu membuat kita melanjutkan hidup, untuk mereproduksi kekuatan kerja kita sehingga mampu terus kita jual; sisanya kita gunakan untuk membeli obyek-obyek yang tak kita butuhkan tetapi kita sa yangi secara pasif. Kita mengkonsumsi dan menyayangi produk-produk dari aktivitas manusia secara pasif. Kita tidak ekis di atas muka bumi sebagai seorang agen yang mentransformasikan dunia, melainkan sebagai seorang yang tak tertolong, pengamat impoten, tanpa harapan, tetapi menyebut situasi pasif ini sebagai “kebahagiaan”; dan semenjak bekerja

dalam situasi modern ini begitu menyakitkan, kita menyebut hasrat mengkonsumsi ini sebagai sumber “bahagia”. Katakanlah ketidak-aktifan sepanjang hidup—sebuah kondisi yang mirip zombie, hidup tetapi tanpa nyawa kehidupan yang aktif. Komoditi, imaji, telah mengkonsumsi kita; kita menggunakan energi hidup kita dalam situasi yang pasif; kita telah dikonsumsi oleh benda-benda. Dalam konteks ini, semakin kita memiliki, semakin kita kekurangan. Maka, di tengah kondisi hidup seperti ini, apakah kita benar-benar melihat tragedi 11 September tersebut, ataukah pemboman Legion, hotel Marriot, dan rentetan peledakan gereja sebagai sebuah tragedi? Ataukah kita hanya melihatnya sebagai sebuah imaji yang ditayangkan di layar televisi di mana dalam hati kita berharap-harap, menebak-nebak, apa yang akan terjadi selanjutnya, seakan semua tragedi tersebut tak berbeda dengan sinetron dan kuis-kuis berhadiah atau film drama pembunuhan? Jujur saja, bukankah kita telah dikonsumsi oleh televisi, oleh media massa? Sesuatu yang apabila tak kita miliki artinya juga sama dengan berkurangnya sumber kebahagiaan kita? Dengan demikian, mana yang benar-benar tragedi, aksi terorisme tersebut ataukah ketidak-hidupan kita sebagai makhluk hidup?

# PERANG MELAWAN TEROR



dominasi hidup kita sehari-hari. Tetapi hanya sedikit yang mampu melihat korelasi antara imaji dan implikasi imaji-imaji yang didorong oleh sesuatu yang nyata terjadi. “Perang Melawan Teror” itu sendiri ada-lah sebuah imaji; sebuah teater yang diproduksi. Tidak bermaksud mengatakan bahwa perang ini tidaklah nyata, tetapi apa yang tidak kita sadari adalah bahwa kekerasan yang nyata justru terlahir dari sebuah masyarakat yang berbasiskan ke-tidaknyataan. Imaji terorisme berakar dalam teror imaji itu sendiri.

Lebih jauh lagi mengenai masifnya pemberitaan di media massa mengenai terorisme dan perang, sebagaimana taktik *public relation* yang digunakan oleh pemerintah untuk memerangkap perspektif publik sesuai dengan yang dilansir dari ruang-ruang pers mereka, imaji disebarkan untuk memenuhi kepentingan para penguasa sistem ini.

Semenjak negara terlahir dari penghisapan antar kelas, maka perang juga menjadi ekspresi paling nyata dari keberadaannya. Sebagaimana ekonomi kapitalisme harus menciptakan kebutuhan

komoditi yang berujung pada akumulasi kapital, negara juga harus secara berkesinambungan menciptakan konflik artifisial untuk membenarkan intervensi terhadap rakyatnya (atau katakanlah warga negaranya). Fakta bahwa negara juga menyediakan beberapa “layanan sosial”, sesungguhnya adalah sebuah kamuffase yang menjadi karakteristik fundamental dari negara itu sendiri, sebagaimana korporasi-korporasi menyediakan “layanan sosial” untuk menutupi karakter fundamentalnya yang eksploitatif. Saat negara sedang berperang dengan negara lain, hasilnya adalah semakin berkurangnya permusuhan antara negara dengan rakyatnya—walaupun pada kenyataannya, perang dengan rakyatnya semakin intens sebagaimana negara membutuhkan pajak rakyat bukan untuk kesejahteraan rakyat sendiri, melainkan untuk membiayai perang. Butuh lebih jelas? Kini perhatikan invasi ke Irak yang dimulai beberapa tahun ke belakang oleh pasukan multinasional. Dalam perang Irak (yang sering dianggap oleh para muslim bahwa perang tersebut adalah perang agama) beberapa negara menjual senjata ke negara lain, kemudian membantahi ribuan tentara (termasuk tentaranya sendiri) dan juga sipil atas nama netralisasi senjata keumatan massal. Lantas para petinggi korporasi mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata dan juga dari proyek-proyek pembangunan kembali negeri yang telah luluh lantak akibat bom-bom dan peluru yang mereka jual. Sementara anggaran bagi jual-beli senjata tersebut juga didapat dari dinaikannya anggaran militer dari hasil pajak rakyat, yang artinya anggaran-anggaran bagi kepentingan lain seperti urusan sosial tentu harus rela dipangkas.

“Perang Melawan Teror” juga digunakan sebagai prakondisi dalam memperhebat kontrol atas publik—badan sensor, orkestrasi patriotisme, penindasan suara-suara sumbang dan aksi-aksi demonstrasi. Lagipula, dengan bermain di tataran imaji, bukan pemerintah lagi yang terkesan memaksakan kehendaknya untuk mengontrol publik; publik sendiri yang merasa bahwa mereka membutuhkan kontrol yang lebih ketat dari pemerintah atas hidup mereka. Publik, di bawah kesan bahwa mereka hanya mengekspresikan murni pandangan-pandangan mereka sendiri, merasa bahwa aksi-aksi teror itu tak dapat dibenarkan sekaligus dalam hati membenarkan bahwa musuh satu-satunya yang harus dilawan saat ini dengan cara apapun juga—yang ironisnya juga jadi membenarkan aksi teror—adalah Amerika Serikat (AS) sebagai musuh, tetapi dalam tataran imaji. Bukan sistem dominasi ekonomi-sosial-politik AS yang mereka lawan, melainkan imaji AS itu sendiri: orang-orang asing khususnya yang berkebangsaan AS, bendera AS dan apapun yang berbau AS.

Kontrol imaji atas hidup juga mendorong pengondisian internal bagi publik itu sendiri. Terepresi secara sosial dan juga psikologis, orang-orang yang terilusi oleh imaji tersebut membiarkan kefrustrasian mereka meledak dalam orgasme sosial yang reaksioner seperti rasisme, kebencian atas “Barat”, kebanggaan kolektif yang mengarah pada sikap fasistik. Kehilangan signifikansi dari hidup harian yang hanya tereduksi menjadi waktu kerja dan waktu luang, mereka memilih berpartisipasi dalam berbagai aksi-aksi militan yang mengakibatkan kehancuran tak berguna lebih jauh lagi: razia orang asing, penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah agama lain, pelaksanaan penerapan syari’ah dalam hanya satu versi saja, pemboman lokasi wisata yang dipenuhi orang-orang “Barat”. Kekurangan makna komunitas yang mendalam, mereka terdorong untuk berbagai tujuan yang sama dengan cara menghajar musuh yang secara visual tampak sama. Ketakutan yang mendalam atas dasar terorisme berbagi rata dengan ketakutan atas semakin tak bermaknanya hidup masyarakat modern. Sementara para aktivis yang merasa mampu menganalisa dengan baik, pada kenyataannya tetap sama saja dengan publik yang terilusi lainnya, mereka tak dapat keluar dari jebakan imaji: mereka hanya melihat bahwa apa yang terjadi adalah hasil dari kebijakan luar negeri AS tanpa sekalipun mampu mengkritisi sis-

tem yang sama yang terjadi di tingkatan lokal atau nasional. Dengan kata lain, bagi mereka kapitalisme adalah sah selama hal tersebut dilakukan oleh orang-orang lokal atau dalam konteks penguatan kembali nasionalisme.

Apapun yang terjadi dalam perang babak baru ini, yang diperparah dengan imaji jihad dari kelompok-kelompok muslim yang terilusi oleh sindrom “Benturan antar Peradaban”, hanya satu hal yang pasti: penghancuran gerakan-gerakan populer dan penindasan kelas pekerja. Perang yang sesungguhnya dilancarkan dengan lebih sengit pada diri kita. Menguatnya gerakan-gerakan yang menolak globalisasi korporasi—yang salah satunya ditandai dengan demonstrasi anti-WTO yang begitu masif di Seattle pada 1999—jelas merupakan sebuah pertanda buruk bagi kapitalisme modern: kekuasaan korporasi global itu sendiri. Kontradiksi tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai menjadi semakin jelas. Tetapi dengan lahirnya “Perang Melawan Terorisme” kontradiksi tersebut kembali menjadi kabur.

Hal yang paling signifikan dalam gerakan melawan “Perang Melawan Teror” adalah spontanitas, keragaman dan karakteristik globalnya semenjak “Perang Melawan Teror” itu sendiri juga menjadi fenomena global. Dalam penentangan terhadap invasi ke Irak, dalam beberapa hari saja ratusan bahkan ribuan orang di sepanjang benua Amerika dan Eropa juga berbagai belahan dunia lainnya mendorong orang-orang untuk mengambil peran dalam aksi demonstrasi, blokade jalanan dan beragam jenis aksi lainnya. Interaksi yang terjadi tak lagi antara audiens dan panggung, melainkan antara individual yang membawa poster-poster protes, yang mendistribusikan leaflet, untuk kemudian berdiskusi antar kawan dan orang asing, membentuk grup-grup baru, mereklamasi ikatan komunitas yang selama ini memudar di tengah gerusan percepatan modernisasi.

Melihat fenomena global demikian, menjadi sesuatu yang amat disayangkan saat melihat orang-orang yang memiliki banyak potensi positif di Indonesia cenderung diabaikan ke dalam sebuah proyek-proyek politik kuantitatif—perekurban massa untuk mencari siapa pemimpin daerah atau presiden selanjutnya yang dianggap layak, kontestasi agama apa yang layak dijadikan landasan hukum Indonesia, grup mana yang paling banyak memiliki jumlah massa dalam setiap kali aksi demonstrasinya, termasuk bagaimana merekrut massa partai bagi Pemilu tahun 2009 mendatang.

“Perang Melawan Kafir” yang diajukan oleh elemen-elemen muslim—dan berhasil merekrut banyak massa pendukungnya, yang mayoritas adalah para muslim yang terrepresi secara sosial dan psikologis di tengah modernisasi—adalah juga sebuah respon yang menyediakan, menuntun pemberlakuan sebuah versi syari’ah dengan menyepelekan kebijakan-kebijakan internasional yang berimplikasi pada kebijakan nasional yang sesungguhnya tak kalah merusak dibandingkan dekadensi moral yang menurut mereka merupakan satu-satunya sumber bencana. Ketidak-mampuan untuk menganalisa situasi dan kondisi nasional dan internasional, terutama dalam persoalan bagaimana sistem ekonomi global justru membutuhkan perang untuk memantapkan eksistensinya di atas muka bumi, jelas tak akan membawa mereka ke manapun. Invasi Afghanistan pasca 11 September dilihat sebagai invasi terhadap dunia Islam tanpa melihat kepentingan ekonomi yang dapat diraup oleh para arsitek perang di Pentagon, mengesampingkan kenyataan bahwa pasca pendudukan Afghanistan, jalur-jalur pipa minyak segera dibangun di sepanjang negeri tersebut menuju laut Kaspia di mana tanker-tanker AS telah menunggu untuk diisi penuh. Mengesampingkan fakta bahwa pada hari yang sama invasi pasukan multinasional ke Irak dicetuskan, korporasi-korporasi yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur telah berebut tentang siapa yang akan pertama menandatangani tender proyek pembangunan Irak pasca pemboman. Atau bahkan

Telah enam tahun berjalan semenjak tragedi 11 September 2001 di New York melahirkan “Perang Melawan Teror”, yaitu perang yang oleh para pencetusnya dianggap sebagai perang antara demokrasi versus terorisme. Tragedi ini beserta perang yang mengikutinya, juga melahirkan perang lain yang tak kalah sengit, yaitu “Perang Melawan Kafir”. Kita melihat transformasi dari berakhirnya Perang Kapitalisme versus Komunisme yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin (yang kebetulan juga jatuh pada angka yang mirip: tanggal 9 bulan 11) menuju babak perang baru dipenuhi dengan krisis kapitalisme global—khususnya yang paling parah adalah krisis ekonomi yang menyerang Asia Tenggara. Apa yang sudah pasti kini, di benak para arsitektur ekonomi global setelah krisis finansial tersebut terlewati adalah pertanyaan bagaimana menghindarkan krisis-krisis lain yang mungkin akan timbul dalam upaya melanggengkan kapitalisme. Tentu, sejarah telah mengajarkan pada kita semua bahwa krisis selalu memperkuat kontradiksi antara penguasa dan yang dikuasai, dan satu-satunya jalan untuk mencegah bersatunya mereka yang dikuasai melawan penguasanya adalah dengan cara memecahnya, menciptakan ketakutan-ketakutan baru, imaji-imaji baru yang akan memecah fokus dan kesadaran bahwa mereka sedang dikuasai.

Banyak orang yang mulai melihat bahwa masyarakat kita saat ini telah berkembang menuju titik di mana imaji-imaji telah men-





## sambungan "Aceh Timur VS. Korporasi"

Kalau di Lengkong, Sukabumi, para petani yang menolak menyerahkan lahan garapannya dan memilih untuk melakukan perlawanan dituduh sebagai kelompok DI/TII, di Aceh Timur warga yang menolak menjual tanahnya dituduh sebagai GPK (Gerakan Pengacau Kemanan). Bahkan pada tahun yang sama, tiga orang warga pengurus Berdikari (sebuah forum untuk menampung persoalan yang selalu dihadapi para petani) ditemukan tewas mengenaskan karena menolak menjual tanah mereka ke pihak PT Bumi Flora.

Warga yang terancam dan tertekan secara psikologis pasca kematian tiga rekan mereka, dengan terpaksa menyerahkan tanahnya dan menerima ganti rugi yang tidak manusiawai. Dan yang paling menyedihkannya lagi bahwa pembayaran ganti rugi oleh pihak PT Bumi Flora tidak sesuai dengan kesepakatan awal. PT Bumi Flora hanya membayar Rp 100.000 untuk lahan seluas 1 Ha atau untuk lahan seluas 21 Ha yang sudah ditumbuhi tanaman maupun tidak. Baru setelahnya ganti rugi sebesar itu harus di potong kembali oleh Polsek sebesar Rp 10.000 per orang.

### Tahun 2001

Sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PT Bumi Flora adalah kejahatan atas kemanusiaan yang tidak bisa di tolelir.

Pada tanggal 9 Agustus 2001 pukul 7.00, puluhan lelaki dikumpulkan diluar rumah-rumah milik mereka oleh sekelompok orang berseragam loreng. Setelah disuruh membuka pakaian dan berjongkok, puluhan lelaki tersebut dibantai dengan senjata api. Tercatat sebanyak 31 orang meninggal dan 7 orang luka-luka. Ke-31 orang itu merupakan karyawan PT Bumi Flora yang menghuni sebuah pemukiman milik perkebunan, Afdeling IV, yang dihuni oleh kurang lebih 52 KK. Pihak TNI yang diduga kuat sebagai pelaku pembantaian menuduh GAM sebagai pelakunya. Namun seorang saksi yang selamat membantah dan mengatakan bahwa TNI-lah pelakunya.

### Tahun 2002

Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) dan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) merupakan dua organisasi yang mendorong warga untuk merebut kembali lahan yang telah dirampas oleh PT Bumi Flora. Akan tetapi karena kondisi Aceh yang

tidak kondusif saat itu, perjuangan warga untuk merebut kembali hak mereka hanya sampai pada pendudukan ladang karet selama empat hari.

### 25 Mei 2007

Sebagai basis perjuangan untuk menuntut hak-hak dasar mereka, warga membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah (FORJERAT). Beberapa tuntutan adalah, pertama: meminta PT Bumi Flora mengembalikan tanah mereka yang telah dirampas, kedua: mendesak pemerintah mengambil alih tanah terlantar untuk segera dibagikan kepada warga, dan terakhir: segera hentikan setiap bentuk intimidasi dan teror oleh PT Bumi Flora terhadap warga korban perampasan tanah.

### 3 Juli 2007

Sekitar 1500 warga yang tergabung dalam FORJERAT berunjuk rasa di gedung DPRK Aceh Timur. Mereka menuntut pengembalian tanah yang telah dirampas oleh PT Bumi Flora seluas 3.400 Ha pada tahun 1990. Aksi dilengkapi dengan poster-poster kecaman terhadap PT Bumi Flora dan penjagaan ketat aparat keamanan.

### 4 dan 6 Agustus 2007

Terkait dengan aksi demonstrasi besar-besaran oleh FORJERAT, delapan staf LBH Banda Aceh sebagai tim pembela dijadikan tersangka oleh Reskrim Polres Langsa karena dianggap telah melakukan agitasi menyangkut pembagian sebaran berisi penjelasan posisi kasus dan tuntutan warga korban perampasan tanah pada malam sebelum aksi. Padahal pada tanggal 1 Juli, pihak LBH telah melayangkan surat pemberitahuan mengenai akan diadakannya aksi kepada Kapolres Langsa yang disetujui pada hari berikutnya (2/7). Staf LBH yang melakukan pembelaan tersebut dituduh melanggar pasal 160 jo 161 sub 335 KUHP, yakni menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan yang isinya menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan.

**TIM REDAKSI:** Sumadikarta, Makhdum Ibrahim, Rikki Rikardo, Bambang Sutedjo, Munaa, Petrus Soemitro, Ari Wibowo, Ahmad

Jurnal Apokalips diterbitkan berkala sebagai bagian dari agenda Kampanye Komuniti Melawan Neoliberalisme. Kampanye ini terlaksana atas inisiatif dari komunitas-komunitas independen sebagai ikhtiar melawan gelombang imperialisme gaya baru yang semakin hari semakin nyata dan terasa dampaknya. Sesuatu yang membuat nyaris segala sesuatu dilabeli harga tetapi semakin sedikit yang diberi arti. Gerai-gerai produk semakin bertebaran di mana pun, tetapi di mana pun juga semakin sedikit yang mampu mengaksesnya. Hidup jadi tak lebih dari sekedar menjadi urusan makan, minum, berkembang biak atau urusan tempat tinggal dan dekorasinya; menjadi urusan konsumsi tapi tidak urusan kreasi. Hidup telah kehilangan artinya. Kami hanya menginginkan hidup kembali menjadi layak untuk dijalani, di mana segala sesuatu diberi arti bukan lagi label harga, sebagaimana kami ingin membangun kembali kerajaan surga di atas puing-puing neraka bumi bersama kalian semua, hingga suatu masa, hidup akan berkembang kembali di hadapan kita seperti mawar di awal musim panas.



# APOKALIPS

PO Box 1419, Bandung 40014  
tim.apokalips@gmail.com  
apokalips.org (-anization)